

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)

Demvi Vebiani<sup>1</sup>, Nugraha<sup>2</sup>, Rd Dian Hardiana<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan alat uji *paired sample t-test*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 pemerintah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Pandemi COVID-19 Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Keuangan, Efisiensi Keuangan

### Abstract

*This study aims to analyze the comparison of regional financial performance in districts/cities in West Java Province before and during the COVID-19 pandemic as measured by the ratio of financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of effectiveness, and the ratio of efficiency. The research method used is descriptive quantitative with paired sample t-test. The population in this study consisted of all districts/cities in West Java Province, amounting to 27 district/city governments. The sampling technique used is saturated sampling, so that all populations are sampled. The results of this study are that there are differences in regional financial performance before and during the COVID-19 pandemic seen from the effectiveness ratio efficiency ratio. ratio of financial independence. However, there is no difference in financial performance seen from the ratio of financial independence and degree of fiscal decentralization ratio. Financial performance during COVID-19 experienced an improvement, seen from the independence ratio and the ratio of the degree of fiscal decentralization. While financial performance, seen from the effectiveness ratio and efficiency ratio is falling.*

**Keywords:** Regional Financial Performance, COVID-19 Pandemic, Financial Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Financial Effectiveness, Financial Efficiency

**Corresponding author.** [demviv27@upi.edu](mailto:demviv27@upi.edu)<sup>1</sup>, [nugraha@upi.edu](mailto:nugraha@upi.edu)<sup>2</sup>, [dianhardiana@upi.edu](mailto:dianhardiana@upi.edu)<sup>3</sup>

**History of article.** Received: Mei 2022, Revision: Juni 2022, Published: Agustus 2022

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah mengubah arah global dan memicu respon yang luar biasa pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan laporan Kemenkes, 2020 dalam (Moudy & Syakurah, Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia, 2020) menyebutkan bahwa WHO (*World Health Organization*) memberikan nama resmi terhadap virus baru ini yaitu 2019-nCov atau

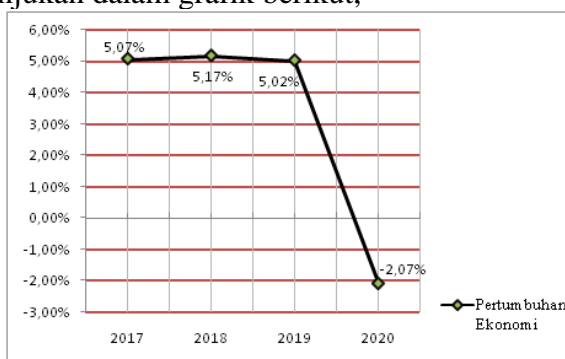
Coronavirus disease 2019 yang merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan pada manusia.

Penyebaran COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek perekonomian secara global. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam (Junaedi, 2020) memprediksi selama COVID-19 negara maju (*Advance Country*) mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi

rata-rata minus 10,7%. Sedangkan rata-rata Negara menengah dan berkembang (*Emerging Country and Middle Country*) mengalami pertumbuhan ekonomi minus 9,1% Dan Negara miskin (*Low Income Developing Country*) mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,7%.

Pertumbuhan ekonomi di Negara yang terdampak pandemi COVID-19 melambat dan mengalami penurunan. Bahkan IMF dalam (Soemartini, 2020) menilai pandemi COVID-19 telah mengubah total kondisi perekonomian global. Pada akhir 2020, Amerika serikat mengalami penurunan minus 3,5%, Jepang menyusut sebesar 4,8%, Jerman mengalami kontraksi sebesar minus 5%, begitupun dengan Prancis terkontraksi 8,2%, Italia mengalami kontraksi 8,9% dan Inggris terkontraksi minus 9,9%. Sedangkan di Asia Tenggara, Singapura mengalami kontraksi sebesar 5,4%, Malaysia minus 5,6%, Indonesia terkontraksi 2,07%. Thailand minus 6,1%, dan Filipina mengalami minus 9,5%.

Krisis kesehatan yang terjadi memberikan dampak signifikan pada aspek perekonomian dunia termasuk Indonesia. Memasuki triwulan kedua tahun 2020, COVID-19 mulai menyebar di wilayah Indonesia. Sejak saat itu, perekonomian Nasional mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dalam grafik berikut,



Sumber: Badan Pusat Statistik  
Gambar 1-1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dari sektor industri penerbangan mengalami penurunan pendapatan sebesar 50%, karena sepanjang Januari sampai Maret 2020 sebanyak 12.703 penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Selain sektor

industri, sektor keuangan juga terkena dampak. Perdagangan indeks harga saham (IHSG) pada 2 Maret 2020 melemah 91,46 poin. Serta nilai tukar rupiah semakin terperosok menembus Rp17.000,00 per dolar AS pada 23 Maret 2020 (Soemartini, 2020). Berdasarkan hasil penelitian (Yamali & Putri, 2020) dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Nasional meliputi:

1. Terjadinya PHK besar-besaran, 90% pekerja di rumahkan dan 10% di PHK. Sehingga meningkatkan angka pengangguran.
2. Terjadinya penurunan PMI *Manufacturing* Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I 2020.
4. Terjadinya inflasi mencapai 2,96% (yoy) dari harga emas dan komoditas pada Maret 2020.
5. Terjadinya penurunan pada sektor penerbangan, perhotelan, pariwisata, dan perdagangan mencapai 50%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020 dapat menyebabkan penurunan realisasi pendapatan negara. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Sayadi, 2021) yang mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan negara selama COVID-19 tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019 sebesar minus 16,53%. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan *refocussing* dan *realokasi* anggaran di berbagai bidang yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona, dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (*Corona Virus Disease* 2019).

*Refocussing* dan *realokasi* anggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah (Onibala, 2021).

Tabel 1-1 Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 (April 2020)

Provinsi	Penanganan COVID-19
DKI Jakarta	Rp10.640.901.596.980
Jawa Barat	Rp8.013.706.790.648
Jawa Timur	Rp2.391.097.521.006
Jawa Tengah	Rp2.126.915.747.000
Aceh	Rp1.792.367.796.000

Sumber: Kemendagri RI

Tabel di atas menunjukkan lima provinsi dengan alokasi anggaran terbesar untuk penanganan COVID-19. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua alokasi anggaran penanganan COVID-19 terbesar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pencegahan laju penyebaran COVID-19 karena Provinsi Jawa Barat juga menyumbang kasus penyebaran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui laman resmi kementerian komunikasi dan informatika, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya pasien terkonfirmasi positif sebanyak 83.579 diakhir tahun 2020.

Meningkatnya kasus COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ishak, 2021). Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah daerah tetap dituntut agar menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Karena dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada PAD sebagai cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Ishak, 2021).

Pendapatan Asli Daerah diambil dari sepuluh provinsi dengan PAD tertinggi mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Bali menduduki provinsi dengan penurunan PAD yang signifikan sebesar -

23,70 persen. Diikuti dengan Kalimantan Timur sebesar -19,32 persen, DKI Jakarta -18,89 persen, Banten -15,89 persen dan Jawa Barat juga menduduki provinsi dengan penurunan yang signifikan sebesar -12,81 persen.

Menurut (Mahmudi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelolah keuangan daerah masing-masing melalui APBD sebagai instrumen kebijakan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tergambar melalui penilaian kinerja (Mahmudi, 2019) keuangan daerah (Adnyani & Wiagustini, 2018). Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui analisis laporan keuangan yang dihitung dari laporan realisasi anggaran untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik (Mahmudi, 2019).

Menurut (Mahmudi, 2019) kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam kemandirian keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, kemampuan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target, dan tingkat efisiensi keuangan daerah.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan Penerimaan PAD mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Penurunan yang signifikan terjadi pada lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, dan Banten. Sehingga tingkat kemandirian keuangan pada 34 provinsi di Indonesia juga mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal pada sejumlah provinsi di Indonesia mengalami

perubahan. Serta tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan pada berbagai provinsi di Indonesia mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan kriteria akibat pandemi COVID-19.

Penelitian (Habibi, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemic COVID-19, 2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19. Dari penelitian (Onibala, 2021) dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Iriani, 2021) memperoleh hasil bahwa kondisi keuangan tidak terpengaruhi signifikan terhadap pandemi COVID-19 dilihat dari meningkatnya pendapatan asli desa Landungsari pada tahun 2019 dan 2020, serta kinerja keuangan Desa Landungsari tahun 2019 dan 2020 sudah dikatakan baik dilihat dari kinerja kemandirian, Efektivitas dan pertumbuhan berjalan dengan baik meskipun kinerja efisiensi masih rendah.

Berlangsungnya pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi pertanyaan mengenai kinerja keuangan daerah. Sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik sebagai evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode berikutnya, serta untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan kinerja keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil pencapaian dari program yang dilaksanakan daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang dilihat dari potensi keuangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 terdiri dari 18 kabupaten dan Sembilan kota. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa APBD dan laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan melalui laman [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan variabel terikat yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi. Dalam analisis inferensial ini peneliti melakukan uji perbandingan atau uji hipotesis menggunakan uji beda. Dalam uji perbandingan, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Namun, karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data keuangan yang memiliki nilai yang ekstrim sehingga tidak diperlukan uji normalitas karena data yang ekstrim menggambarkan data berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, peneliti tidak melakukan uji asumsi klasik dan langsung melakukan uji hipotesis menggunakan uji

beda yaitu adalah uji T-Berpasangan atau *Paired Sample T Test*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan uji perbandingan dengan statistik uji beda untuk melihat gambaran perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur melalui empat indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi.

### 1. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Kemandirian

Hasil uji *paired sample t-test* pada rasio kemandirian menghasilkan nilai t-hitung sebesar -0,472 dan derajat kebebasan (df) sebesar 26. Kriteria pada penelitian ini adalah membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nilai Sig. (2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 0,641 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah menerima  $H_0$  dan  $H_1$  ditolak yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio kemandirian pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi covid19.

Tingkat kemandirian keuangan sebelum dan pada saat pandemic COVID-19 tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif, dimana alokasi PAD hanya menyumbang sebesar 35% dibandingkan pendapatan transfer dalam membiayai operasional pemerintahan. Sedangkan berdasarkan konsep kemandirian, daerah dapat dikatakan mandiri jika realisasi PAD lebih besar daripada pendapatan transfer.

Implikasi penelitian menolak hipotesis atau tidak terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19 kabupaten/kota rata-rata belum memaksimalkan PAD meskipun ketergantungan terhadap pendapatan transfer sudah mulai berkurang. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengupayakan potensi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan tidak terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Kemandirian juga menunjukkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. Campur tangan pemerintah pusat ditunjukkan pada alokasi dana transfer yang diterima daerah. Namun, kebijakan campur tangan pemerintah pusat dalam pembiayaan pemerintahan daerah tidak berubah meskipun pandemi COVID-19. Sehingga kinerja keuangan yang dilihat dari kemandirian tidak terdapat perbedaan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

Secara rata-rata PAD mengalami penurunan sebesar 6,82% karena terjadinya penurunan potensi perekonomian, dan dana transfer mengalami penurunan sebesar 7,99% karena realokasi anggaran yang berfokus pada penanganan kasus COVID-19. Sehingga menunjukkan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian mengalami perbaikan pada saat pandemic COVID-19.

Selain itu, terdapat upaya intensifikasi PAD yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui (1) menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan, (2) mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memnuhi kewajibannya, (3) meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, (4) memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, gerai

samsat dan samsat *mobile*, layanan SMS, samsat outlite, samsat gendong, aplikasi sambara, aplikasi sipolin, samsat J'Bret, (5) menggalakkan program akselerasi pendapatan daerah yaitu program untung plus (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2021). Oleh karena itu, meskipun PAD dan dana tranfer mengalami perubahan akibat pandemi COVID-19, namun tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada tingkat kemandirian keuangan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

## 2. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan uji *paired sample t-test* pada rasio derajat desentralisasi fiskal menghasilkan nilai *t*-hitung -0,934 dan derajat kebebasan (*df*) sebesar 26. Nilai Sig. (2-tailed) pada rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,359 yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 5% taraf signifikansi. Maka dari itu keputusan hipotesis adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan kemandirian keuangan, hasil penelitian pada rasio desentralisasi fiskal juga menolak hipotesis atau tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang baik karena PAD hanya mampu berkontribusi 20-30 persen dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Sehingga menunjukkan kemampuan desentralisasi baik sebelum maupun pada saat pandemic COVID-19 masih dinilai rendah dan dibawah rata-rata standar, dimana daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan desentralisasi jika PAD mampu berkontribusi minimal diatas 30%.

## 3. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Efektivitas PAD

Hasil uji *paired sample t-test* pada rasio efektivitas menghasilkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%. Berdasarkan kriteria, maka hipotesis yang diterima adalah  $H_1$  dan menolak  $H_0$  yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan rasio efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

Selama pandemi COVID-19 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami kesulitan dalam mengupayakan penerimaan PAD untuk mencapai target yang telah ditetapkan akibat pandemi COVID-19. Hal ini karena target PAD dalam perubahan APBD tahun 2020 rata-rata daerah masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perbaikan perekonomian pada triwulan III dan triwulan IV meskipun secara keseluruhan perekonomian di tahun 2020 masih berkontraksi.

Sedangkan realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan karena perbedaan potensi perekonomian dalam merelisasikan PAD, sehingga daerah mengalami kesulitan mencapai penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlambatan perekonomian yang terjadi berimplikasi pada penerimaan pendapatan asli daerah dimana kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD sesuai dengan target yang dianggarkan mengalami penurunan. Sebelum pandemi COVID-19 realisasi penerimaan PAD sesuai dengan target sebesar 98%, sedangkan pada saat pandemi COVID-19 hanya sebesar 88%.

Sulitnya mencapai penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan karena penurunan potensi perekonomian sehingga sumber daya daerah juga melambat. Sumber Penerimaan PAD di Provinsi Jawa Barat didominasi oleh penerimaan pajak dan retribusi daerah. Namun, dilihat dari data Bapenda Jawa Barat (2021), penerimaan pajak mengalami



penurunan sebesar minus 13% di tahun 2020. Hal ini selaras dengan penelitian (Harjo, 2021) yang mengemukakan bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan penerimaan PAD yang disebabkan oleh penurunan penerimaan wajib pajak daerah akibat terdapat 342.722 pekerja di kabupaten/kota Jawa Barat di PHK dan dirumahkan pada saat pandemi COVID-19. Pada agustus 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun 3% dibandingkan agustus 2019. Sehingga terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 8,04% pada agustus 2019 menjadi 10,46% pada agustus 2020.

Perbedaan juga didukung karena dilihat dari data per kabupaten/kota, terdapat daerah yang mengalami perbedaan paling mencolok yaitu Kabupaten Pangandaran. Perbedaan tersebut menunjukkan kemampuan daerah Kabupaten Pangandaran dalam merealisasikan penerimaan PAD yang direncanakan mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Hal ini karena di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, target PAD yang direncanakan mengalami peningkatan paling tinggi diantara 27 daerah lainnya yaitu sebesar 72% dari target PAD 2019. Namun, ditahun 2020 Kabupaten Pangandaran tidak berhasil merealisasikan target PAD tersebut karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penerimaan PAD Kabupaten Pangandaran terkontraksi sebesar 8%.

#### 4. Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan

Berdasarkan uji *paired sample t-test* pada rasio efisiensi menghasilkan t-hitung sebesar 0,111 dan derajat kebebasan 26. Nilai Sig. (2-tailed) pada rasio efisiensi sebesar 0,032 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 5%. Maka dari itu, keputusan yang diambil adalah menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$  yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rasio efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

Pengelolaan keuangan sebelum pandemi COVID-19 tergolong kurang efisien dengan belanja daerah sebesar 98% dari total pendapatan daerah. Kemudian menurun menjadi tidak efisien karena belanja daerah yang melebihi total pendapatan daerah sebesar 103%.

Dalam konsep tingkat efisiensi keuangan dapat diukur dengan membandingkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan daerah dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Sedangkan potensi pendapatan daerah menurun dalam membiayai belanja daerah yang bertambah fokus oleh penanganan kasus COVID-19. Dan potensi perekonomian menurun yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah.

Perbedaan juga didukung karena dilihat dari data per kabupaten/kota terdapat daerah yang mengalami penurunan efisiensi keuangan pada saat pandemi COVID-19 paling mencolok yaitu Kabupaten Bogor yang menurun sebesar minus 14%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja Kabupaten Bogor meningkat dibandingkan tahun sebelum COVID-19 yaitu meningkat sebesar 8%, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar minus 6%. Sehingga belanja daerah Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima pada saat pandemi COVID-19.

## SIMPULAN

Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Tingkat kemandirian keuangan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,003 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Meskipun secara keseluruhan tingkat kemandirian

keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat baik sebelum maupun pada saat pandemi masih tergolong rendah dengan pola hubungan konsultatif.

Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Desentralisasi fiskal pada saat pandemi COVID-19 lebih tinggi 0,003 dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Meskipun secara keseluruhan tingkat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih tergolong kurang baik dalam penyelenggaraan desentralisasi baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19.

Tingkat efektivitas keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas keuangan pada saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 0,093. Pengelolaan PAD sebelum pandemi COVID-19 sudah dinilai sangat efektif, namun pada saat pandemi COVID-19 menurun menjadi kurang efektif.

Tingkat efisiensi keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. Dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbaikan sebesar 0,05 dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.

Adapun saran atas penelitian ini yang dapat diberikan terkait hasil penelitian dan adanya keterbatasan penelitian Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih memiliki kemampuan yang rendah dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi fiskal. Sehingga harus ada peningkatan kontribusi PAD terutama untuk pemulihan kondisi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang

dimiliki daerah, pengembangan badan usaha dengan mendayagunakan masyarakat.

Terdapat kesenjangan kinerja keuangan yang tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan peranan pemerintah provinsi dalam memberikan arah pengembangan potensi daerah, dan peranan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing yang dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan daerah.

Untuk peneliti selanjutnya Memperluas indikator penilaian kinerja keuangan, seperti menambahkan rasio pertumbuhan dan keserasian, juga melihat dari indikator laporan keuangan seperti rasio solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan.

Dalam penelitian hanya mengambil data dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Sedangkan fakta di lapangan di tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berlangsung. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah periode waktu pengamatan untuk hasil penelitian yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, & Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Adiputra, A., Apriyanti, A., & Rohmah, K. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Global Financial Accounting Journal*, 31-38.
- Adnyani, & Wiagustini. (2018). Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Serbagita Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen*, 1111-1141.



- Agnika, M. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 493-503.
- Alpi. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi*, 103-114.
- Andrifa, M. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Buku Ajar metodologi penelitian kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA*, 61-80.
- Ariandi, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11-15.
- Arifah. (2012). Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik. *Prestasi*, 1411-1497.
- Asri, J. (2016). Perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1021-1034.
- BAPENAS. (2020). *Luas Daerah Kabupaten/Kota 2018 - 2019*.
- Basrie, H., Arly, Y., & Riswan. (2012). Analisis Laporan Keuangan Dikaitkan Dengan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 123-138.
- Bungin, B. (2005). *Metodelogi Penelitian kauntitatif*. Jakarta: KENCANA.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory Of Management. *Academy of Management Review*, 20-47.
- Defitri, S. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keunagan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 64-75.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021). *Realisasi APBD 2020*. Retrieved from [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Realisasi-APBD-2020\\_08092021.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Realisasi-APBD-2020_08092021.xlsx) [
- Djahnegara. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Bogor: Kesatuan Press.
- Donaldson, & Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 49-65.
- Fathiyah, & Masnun. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual Tahun 2014-2015. *Jurnal of Economics and Business*, 70-77.
- Habibi. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemic COVID-19. *Neraca*, 122-147.

- Habibi. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemic COVID-19. *Neraca*, 122-147.
- Haliah. (2015). Quality of Report, is there A Management, and Information Technology Role? Empirical Evidence from West Sulawesi Province, Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 12, 177-194.
- Hamdi, A., & Bahruddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Retrieved from Google Books: [https://www.google.co.id/books/editon/Metode\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_Aplikasi\\_d/nhwaCgAAQBAJ?hl=engbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/editon/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Aplikasi_d/nhwaCgAAQBAJ?hl=engbpv=1&kptab=overview)
- Haning, M., Hasniati, & Tahili, M. (2021). *Public Trust: Dalam Pelayanan Organisasi Public Konsep, Dimensi, dan Strategi: UPT Unhas Press*. Retrieved from Google Books: [https://books.google.co.id/books/about/PUBLIC\\_TRUST.html?hl=id&id=xrsXEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/PUBLIC_TRUST.html?hl=id&id=xrsXEAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Harjo, D. (2021). Penggalan Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 1-9.
- Hohl, W. (2021). COVID-19 and Digital Transformation: Developing an Open Experimental Testbed for Sustainable and Innovative Environments Using Fuzzy Cognitive Maps. *Computer Science*.
- Iriani. (2021). Kinerja Keuangan Ditinjau dari Perimbangan Kemandirian, Perimbangan Efektivitas, Perimbangan Efisiensi dan Perimbangan Pertumbuhan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 83-90.
- Ishak, J. F. (2021). Covid-19: Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, 587-591.
- Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 14-28.
- Jensen, & Meckling. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownerhsip Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Junaedi. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 305-360.
- Kariyoto. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Retrieved from Google Books: [https://books.google.com/books/about/Analisa\\_Laporan\\_Keuangan.html?hl=id&id=DjBODwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Analisa_Laporan_Keuangan.html?hl=id&id=DjBODwAAQBAJ)
- Kurniawan, A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: PANDIVA BUKU.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maipan, R., Handra, H., & Suhairi. (2018). The Analysis of Financial Capacity Level of Parent Regional Government in Indonesia Before and After Proliferation of Administrative Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 251-261.
- Mangantar, M. (2018). An Analysis of the Government Financial Performance

- on Community Welfare in Nourth Sulawesi Province Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 137-143.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7, 190-198.
- Mbipi, S., Assih, P., & Sumtaky, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Good Governmance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Accounting and Financial Review*, 152-158.
- Moudy, & Syakurah. (2020). Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Journal of Public Health Research and Development*, 333-345.
- Moudy, & Syakurah. (2020). Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *Journal of Public Health Research and Development*, 333-345.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2018). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 195-224.
- Nasution, D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 149-162.
- Novendra. (2014). Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22, 183-193.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Nuryadi. (2017). *Dasar-Dasar Statistic Penelitian*. Yogyakarta: SIBUKU MEDIA.
- Oktalina, G. (2021). Analysis of Regional Financial Performance Through the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio in the District South Bangka. *International Journal of Finance Research*, 60-73.
- Onibala, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 67-89.
- Oyeka, I., & Ejuh, G. (2012). Modified Wilcoxon Signed Rank Test. *Open Journal of Statistics*, 172-176.
- Pasoloran, O., & Rahman, F. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 419-432.
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 37-46.
- Rahmawati, F., & Kiswara, E. (2022). Dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah (studi kasus pada 34 Pemrintah Provinsi di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1-8.
- Rahmawati, S. (2017). *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=hJDPDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=teori+keagenan&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj\\_x6LB1oPvAhVOb30KH W](https://books.google.co.id/books?id=hJDPDwAAQBAJ&pg=PA37&dq=teori+keagenan&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj_x6LB1oPvAhVOb30KH W)

- 1vAuUQ6AEwA3oECAQQA#v=onepage&q&f=false.
- Rosyidah, M. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama.
- Rusherlistyanti. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 43-66.
- Sari, & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-11.
- Sayadi, M. (2021). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 159-171.
- Soemartini. (2020). Stimulus Perekonomian di Tengah Krisis Ekonomi Lokal dan Global Akibat Merebaknya COVID-19. *Jurnal Statistika Teori dan Aplikasi: Biomedics, Industry & Business and Social Statistics*, 35-54.
- Sumini. (2019). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Perbandingan Negara-Negara di Asia Tenggara (The Local Government Financial Performance: Southeast Asia Countries Comparison). *Journals of Economics Development Issues*, 15-23.
- Supriyadi, A. (2021). Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 39-43.
- Susanti, E. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolak
- Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal of Accounting*, 1-16.
- Suwanda, D., Junjuran, B., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko: Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wijaya, I. (2021). Studi Komparasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi*, 88-96.
- Yamali, & Putri. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 384-388.
- Yunus, Y. A. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Papua dimasa Pndemi Covid-19. *Journal of Management*, 4(1), 139-150.
- Yusuf, Y. (2017). Konstruksi Penalaran Statistis pada Statistika Penelitian. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7, 60-69.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 143-149.

Zulkarnain. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Cakrawala*, 61-74.

#### Peraturan Peundang-undangan

Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

#### Artikel dan Website

Badan Pusat Statistik. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2017. Berita Resmi Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2018. Berita Resmi Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2019. Berita Resmi Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020. Berita Resmi Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020). Luas Daerah Kabupaten/Kota 2018-2019. Geografi.

Bapenas. (2017). Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). Ringkasan APBD 2019. [Online]. Tersedia: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/APBD2019\\_10092020-Website.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/APBD2019_10092020-Website.xlsx) [9 September 2021].

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). Ringkasan APBD 2020. [Online]. Tersedia: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/APBD-2020\\_per8Juli2020\\_value.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/APBD-2020_per8Juli2020_value.xlsx) [9 September 2021].

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2020). Realisasi APBD 2019. [Online]. Tersedia: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LRA-2019\\_update-21-Oktober-2020.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LRA-2019_update-21-Oktober-2020.xlsx) [9September 2021].

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2021). Realisasi APBD 2020. [Online]. Tersedia: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Realisasi-APBD-2020\\_08092021.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Realisasi-APBD-2020_08092021.xlsx) [September 2021].